

## EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA

**Krisno Wibowo**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : [nonok\\_fabregas@yahoo.co.id](mailto:nonok_fabregas@yahoo.co.id)

### Abstrak

**Krisno Wibowo:** Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan gratis dan wajib belajar 12 Tahun di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. **Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis dan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dan bagaimana implementasi dari kebijakan pendidikan gratis dan wajib belajar 12 tahun tersebut. Dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisis permasalahan menggunakan teori dari Langbein yaitu evaluasi proses yang menganalisis berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Dalam hal ini petunjuk teknisnya adalah petunjuk teknis Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

Peneliti menggunakan 2 (dua) indikator yang terdapat di dalam petunjuk teknis BO yaitu dana BOP dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). BOP yang diterima sekolah masih kurang tidak sesuai dengan RKA-KS yang disusun oleh sekolah, sehingga banyak kegiatan dan program sekolah yang dibatalkan atau tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan sarana prasarana di beberapa sekolah masih sangat kurang dan memprihatinkan. Sedangkan BSM distribusinya masih kurang tepat sasaran.

Saran sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada orangtua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan, melakukan penambahan sarana dan prasarana sekolah, membuat peraturan baru yang mengatur tentang sanksi bagi anak yang berhenti atau putus sekolah sehingga wajib belajar 12 tahun dan mutu pendidikan di Kabupaten Kayong Utara menjadi lebih baik.

**Kata kunci:** evaluasi, implementasi, juknis BOP, Bantuan operasional Pendidikan (BOP), Bantuan Siswa Miskin (BSM), wajib belajar 12 tahun.

### Abstract

**Krisno Wibowo:** The Evaluation of The Implementation of Free Education Policy and The Obligation of 12 Years Learning Program in Sukadana Subdistrict of Kayong Utara Regency. **Skripsi. Pontianak : Public Administration Science Study of Governmental Cooperation between West Kalimantan Government with the Faculty of Social Science and Politics.**

This Skripsi is intended to evaluate the Implementation of Free Education Policy and Obligation of 12 Years Learning Program in Sukadana Subdistrict of Kayong Utara Regency and how the implementation of Free Education policy and obligation of 12 the years learning is moving. In this skripsi, the researcher analyse the problem by using the theory from Langbein which is evaluate the process by analysing of the technical guide and execution. In this case, the writer is using the Aid of Education Operational ( BOP) technical guide .

The researcher used 2 (two) indicators of technical guide execution of BOP that are fund of BOP and Bantuan Siswa Miskin ( BSM). BOP accepted by the school is still inappropriate with RKA-KS compiled by school, so that a lot of activities and programs at the school canceled or do not run properly and facilities in some schools are still very less and concern. While BSM distribution is still less from its goal.

Suggestion referring to this research result expected for Local Government of Kayong Utara Regency is improving the socialization process to parents and society for the importance of education, adding school facilities, making new regulation arranging about sanction for child desistance or break the school so that the obligation of 12 years learning and quality of education in Kayong Utara Regency become better.

**Krisno Wibowo**

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

Page 364

**Key words:** evaluation, implementation, technical guide of BOP, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Bantuan Siswa Miskin (BSM), the obligation of 12 years learning

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Sebagai salah satu negara berkembang, masih banyak permasalahan yang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) bagi kita bangsa Indonesia, yang mana permasalahan-permasalahan ini memerlukan pemikiran untuk pemecahannya. Salah satu masalah yang kita hadapi adalah masalah di bidang pendidikan, yang mana seperti yang kita ketahui permasalahan pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang krusial seperti halnya dengan permasalahan ekonomi yang harus segera di cari solusinya. Begitu kompleks permasalahan pendidikan di Indonesia, mulai dari biaya pendidikan yang begitu tinggi, hingga sampai permasalahan infrastruktur dan gedung sekolah tempat proses belajar mengajar yang sangat memprihatinkan khususnya di daerah-daerah terpencil yang jauh dari pusat kota.

Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku sekolah baik secara formal maupun informal. Begitu besarnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan mengakibatkan banyaknya sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang di inginkan para murid-murid yang ingin bersekolah. Tapi terdapat banyak kendala, salah satunya adalah biaya pendidikan yang makin meningkat setiap tahunnya, sehingga cukup sulit di jangkau bagi orangtua murid yang kurang mampu.

Pemekaran Kabupaten Kayong Utara dari Kabupaten Ketapang diharapkan mampu membawa kearah yang lebih baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara mempunyai tugas besar dalam membangun Kayong Utara. Salah satu tugas besar tersebut adalah peningkatan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut SDM.

Cara yang di temp h untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Kayong Utara adalah melalui pendidikan. Dengan terobosan terbaru Pemerintah Dearah Kabupaten Kayong Utara melalui Bupati Kayong Utara H. Hildi Hamid yang membebaskan seluruh biaya sekolah, dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan wajib belajar 12 tahun, yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 60. A Tahun 2009 tentang penyediaan layanan pendidikan gratis untuk tingkat SD/MI,SMP/MS, SMA/MA dan SMK dengan rentang belajar selama 12 tahun.

Alasan Bupati Kabupaten Kayong Utara membebaskan seluruh biaya pendidikan dikarenakan masih ada ditemukan orangtua yang melarang anaknya untuk sekolah, selain itu akibat kemiskinan, angka putus sekolah (APS) sangat tinggi pada waktu itu, bangku sekolah banyak yang kosong, orang tua melihat anaknya lebih bermanfaat membantu diladang atau menangkap ikan di laut. Sebagian lagi membiarkan anaknya berkeliaran. Data tahun 2009 menunjukkan

jumlah anak terlantar di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 149 orang.

Menjadi kabupaten otonom baru dan termiskin di Kalimantan Barat pada 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara membuat keputusan berani dengan membebaskan seluruh biaya pendidikan hingga ke tingkat sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Bahkan, siswa masih mendapat seragam gratis minimal dua stel setiap tahun ajaran baru. Dari Data BPS Tahun 2011 Kabupaten Kayong Utara khususnya Kecamatan Sukadana dikategorikan miskin karena masih terdapat 291 KK yang masuk kedalam keluarga Pra Sejahtera/ sangat miskin, dan Dari data BAPPEDA Kabupaten Kayong Utara tahun 2010 menunjukkan kepadatan penduduk kayong utara berkisar 20 jiwa per kilometer persegi. Namun dari 95.605 jiwa penduduk, sebanyak 39.408 jiwa dikategorikan miskin (41%). Kabupaten Kayong Utara dimekarkan dari Kabupaten Ketapang pada tahun 2007 dan boleh dibilang sektor pendidikannya sangat parah. Kendati sudah hampir 5 tahun program wajib belajar 12 tahun digulirkan, rata-rata lama sekolah anak-anak di Kayong Utara hanya lima tahun.

Kabupaten Kayong Utara menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang telah membuat kebijakan pendidikan gratis selama masa belajar 12 tahun. Dengan adanya pendidikan gratis ini anak-anak yang mulanya tidak mampu untuk bersekolah diharapkan bisa bersekolah, dan bagi anak-anak yang putus sekolah dikarenakan tidak mampu membayar uang sekolah diharapkan bisa bersekolah kembali.

Kebijakan dari Bupati Kayong Utara ini tidak

akan berjalan dengan maksimal jika tidak ada perubahan dalam hal pendidikan di Kayong Utara. Perubahan tersebut ditandai dengan :

1. Pemerataan kesempatan bagi anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan;
2. Membantu meringankan beban orang tua murid;
3. Mengurangi angka putus sekolah;
4. Mendorong peningkatan APK dan APM Pendidikan;
5. Mendorong peningkatan mutu program wajib belajar sembilan tahun;
6. Meningkatkan mutu pendidikan menengah.

Sejak terbentuknya Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2007, banyak permasalahan dalam bidang pendidikan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara. Dimana pada tahun 2008 anak-anak usia sekolah yang berusia antara 6 tahun sampai 19 tahun yang berjumlah 28.000 orang, 11.000 ribu diantaranya tidak bersekolah. Sehingga Angka Partisipasi Kasar (APK) pada waktu itu hanya 67%, yang bermula dari output pendidikan di Kabupaten Kayong Utara. Dari 80.000 usia masyarakat produktif, hanya 6 persen diantaranya yang tingkat pendidikannya lulus SMA/SMK atau perguruan tinggi. Ini menjadi salah satu indikator atau tujuan dari adanya kebijakan pendidikan gratis ini, dengan harapan dapat meningkatkan APK dan APM pendidikan.

Kondisi pendidikan di Kayong Utara yang memprihatinkan disebabkan berbagai masalah, antara lain minimnya jumlah sekolah, kemiskinan, dan rendahnya motivasi pendidikan. Dengan jumlah penduduk 90.239 pada tahun 2007, Kayong Utara hanya

memiliki 81 sekolah dasar (SD), enam sekolah menengah pertama (SMP), dan empat sekolah menengah atas (SMA). Kemiskinan bisa dilihat dari pendapatan per kapita penduduk Kayong Utara pada tahun 2007 yang hanya Rp 260.000. Rendahnya motivasi pendidikan terlihat dari rendahnya APK yang hanya 67 persen pada tahun 2007. Ini terjadi karena sebagian besar anak-anak usia sekolah terserap ke sektor usaha penangkapan ikan.

Menurut data yang peneliti dapatkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara tahun 2011/2012, jumlah sekolah dan madrasah yang ada di 5 kecamatan, Kecamatan Sukadana belum memiliki sekolah Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA. Padahal Kecamatan Sukadana merupakan ibukota kabupaten yang seharusnya memiliki sekolah setingkat SMA yaitu MA, sehingga anak-anak sukadana yang ingin bersekolah di MA tidak perlu bersekolah hingga ke Kecamatan Simpang Hilir dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit dengan kendaraan bermotor dan kurang lebih 1 jam jika menggunakan kendaraan sepeda. Ini merupakan salah satu masalah pemerataan sekolah yang harusnya tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara sehingga anak-anak yang ingin bersekolah tidak perlu sampai menyeberangi kecamatan dengan jarak yang cukup jauh setiap hari hanya untuk bersekolah.

Menurut data yang peneliti dapatkan pada LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara tahun 2011, Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara mempunyai sebuah program dengan misi peningkatan mutu pendidikan menengah dan pembebasan seluruh

biaya (gratis) bagi seluruh kalangan. Dengan pembebasan seluruh biaya bagi seluruh kalangan, masyarakat yang kurang mampu/miskin pasti akan terbantu, tapi jika di peruntukan bagi orang kaya/mampu saya rasa kurang sesuai. Jika masyarakat yang mampu bersekolah tetapi biaya digratiskan ini merupakan pemborosan anggaran di bidang pendidikan. Apalagi dengan pendidikan gratis ini pemerintah daerah banyak menggunakan anggaran yang cukup besar yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten. Kurang te at jika anggaran yang besar ini dialokasikan untuk orangtua murid yang mampu. Jika bagi orangtua murid yang mampu tidak di bebaskan biaya maka anggaran tersebut dapat diperuntukan bagi peningkatan dan penambahan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.

## 2. Rumusan Permasalahan

Dilihat dari latar belakang dan fokus penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan tentang implementasi kebijakan penyediaan layanan pendidikan gratis yang diatur dalam Perbup No.60. A Tahun 2009 adalah bagaimana implementasi kebijakan pendidikan gratis dan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dan kesesuaian antara proses implementasi suatu kebijakan pendidikan gratis untuk wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tahun 2012 dengan petunjuk teknis Bantuan Operasioanal Pendidikan (BOP).

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan gratis dan wajib belajar 12 tahun di

Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tahun 2012 dengan petunjuk teknis Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

#### 4. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan baik dari peneliti maupun pembaca dapat mengetahui lebih dalam mengenai masalah yang ada melalui rumusan masalah, serta dapat ditemukan pemecahan masalah melalui rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Selanjutnya diharapkan dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan kontribusi teoritis tentang kebijakan publik, salah satunya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan tentang pendidikan gratis yang berdasar pada Perbup No. 60.A Tahun 2009 di Kabupaten Kayong Utara.

##### b. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi (masukan) perbaikan dalam strategi implementasi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara, khususnya tentang kebijakan pendidikan gratis dan wajib belajar 12 tahun yang merupakan program unggulan di Kabupaten Kayong Utara.

perhatian dan penanganan pemerintah yang cepat namun juga akurat agar masalah-masalah yang begitu kompleks dan berat yang dihadapi oleh pemerintah segera dapat diatasi. Kondisi ini pada akhirnya menempatkan pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya berada pada pilihan-pilihan kebijakan yang sulit. Kebijakan yang diambil tersebut terkadang membantu pemerintah dan rakyat Indonesia keluar dari krisis, tetapi dapat juga terjadi sebaliknya yakni malahan mendelegitimasi pemerintah itu sendiri.

Lebih lanjut Anderson dalam Koryati dkk (2005:7) memberikan definisi mengenai kebijakan publik. Mereka menjelaskan bahwa : Kebijakan publik merupakan pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparaturnya. Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. Dalam kehidupan administrasi negara, secara formal, keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan jika suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus di evaluasi. Untuk dapat mengetahui *outcome*, dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu

## B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

### 1. Kerangka Teori

Dalam beberapa tahun belakangan ini, dimana persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah sedemikian kompleks akibat krisis multidimensional, maka bagaimanapun keadaan ini sudah barang tentu membutuhkan

tertentu, misalnya, 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka *outcome* dan dampak dari suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan. Sebagai contoh, untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Bupati No. 60 A Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis, baru dapat dilakukan pada tahun keempat atau kelima. Sebab pada tahun pertama baru tahap sosialisasi, tahun kedua masuk tahap penciptaan berbagai peraturan pemerintah untuk mendukung berbagai pelaksanaan pasal-pasal dalam undang-undang yang bersangkutan, tahun ketiga baru mulai diimplementasikan. Tahun keempat dan kelima baru dapat diketahui *outcome* dan dampaknya dari implementasi Peraturan Bupati tersebut.

Selanjutnya Muhadjir dalam Widodo (2008: 112) mempertegas lagi mengenai evaluasi dalam pernyataannya bahwa :  
Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/target kebijakan publik yang ditentukan. Evaluasi kebijakan dibedakan dalam dua macam tipe. Pertama, tipe evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*), yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Kedua, tipe evaluasi proses (*process of public policy implementation*), yang mendasarkan diri

pada petunjuk pelaksanaan (*juklak*) dan petunjuk teknis (*juknis*).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Langbein dalam Widodo (1980 :7), Yang membedakan tipe riset evaluasi (*type of evaluation research*) menjadi dua tipe, yaitu *riset process* dan *riset outcome*. Peneliti menggunakan tipe evaluasi proses, dengan metode deskriptif. Metode deskriptif menjadi penting dalam evaluasi ketika kita sulit untuk menemukan atau membuat hubungan sebab akibat. Metode deskriptif berusaha menemukan apakah semua program utama telah tercapai dengan baik atau sebaliknya. Metode deskriptif ini juga mengevaluasi tingkat atau derajat manfaat atau keuntungan yang telah ditetapkan dalam suatu program atau menentukan apakah manfaat nyata yang dari suatu program dinikmati oleh mereka yang menjadi kelompok sasaran (*target groups*) yang paling banyak atau paling sedikit. Penelitian yang memfokuskan pada proses dengan suatu program yang dilaksanakan maka penelitian itu didasarkan pada *guide line* yaitu petunjuk lapangan (*juklak*) dan petunjuk teknis (*juknis*).

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Untuk pembiayaan seluruh kegiatan sekolah, pemerintah daerah mengeluarkan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang bersumber dari dana pusat, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Kayong Utara yang berfungsi sebagai pembiayaan pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara. BOP yang diterima oleh

sekolah untuk selanjutnya dapat dikelola untuk kebutuhan sekolah.

Dana BOP yang diterima oleh sekolah masih belum cukup untuk memenuhi dan menjalankan program-program di sekolah. Dana BOP yang diterima oleh sekolah tidak sesuai dengan RKA-KS yang di anggarkan oleh sekolah, sehingga ada beberapa kegiatan-kegiatan dan program sekolah yang tidak bisa di realisasikan.

Dengan jumlah BOP yang sedikit, sekolah cukup sulit untuk mengembangkan sarana prasarana dan infrastruktur sekolah, karena sekolah tidak diperbolehkan lagi melakukan pungutan/sumbangan kepada orangtua/wali murid. Kondisi sarana dan prasarana yang ada sudah cukup baik khususnya di sekolah-sekolah negeri, untuk di sekolah yang berjenis madrasah kondisi sarana dan prasarananya cukup memprihatinkan.

## 2. Bantuan Siswa Miskin (BSM)

BSM merupakan bantuan siswa miskin yang diterima oleh siswa-siswi yang masuk kedalam kategori miskin. Jumlah BSM yang diterima setiap jenjang pendidikan tidak sama. Sekolah mempunyai tugas untuk mengelompokan dan mengkategorisasikan anak yang berhak dan tidak berhak menerima BSM. Tapi walaupun demikian masih terdapat masalah dalam pendistribusian BSM. Masih ditemukan anak yang berasal dari orangtua mampu mendapatkan BSM dan sebaliknya anak yang berasal dari orangtua tidak mampu tidak mendapatkan bantuan. Pihak sekolah mengakui kesalahan mereka dalam mendaftarkan siswa yang berhak menerima BSM.

Dalam pelaksanaannya masih ditemukan orangtua siswa yang menggunakan BSM

untuk keperluan lain. Padahal, sudah jelas disampaikan oleh pihak sekolah melalui kepala sekolah, bahwa BSM merupakan bantuan yang digunakan sepenuhnya untuk keperluan anak sekolah, seperti membeli tas, sepatu, pakaian pengganti, buku tulis dan lain-lain. Masih ada orangtua siswa yang belum bisa mengelola BSM untuk keperluan anaknya sekolah dengan baik. Adanya pemotongan dengan alasan yang kurang jelas dari pihak sekolah membuat pendistribusian BSM kepada anak menjadi kurang *transparan*.

## 3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Wajib belajar 12 tahun

Masih ada di kecamatan Sukadana yang memiliki pemikiran-pemikiran sempit dan radikal terhadap adanya pendidikan gratis ini, masih ada masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting, baginya anak adalah cerminan orangtuanya. Jadi, apa yang dikerjakan oleh orangtuanya juga harus dikerjakan oleh anaknya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat membuat anak-anak yang masuk dalam usia sekolah terserap ke dalam sektor industri pertanian dan perikanan, yang mengakibatkan sekitar 40% anak usia sekolah setingkat SMA masih belum bersekolah.

Selain itu juga, untuk pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Sukadana belum berjalan dengan optimal dimana masih terlihat anak usia sekolah masih ada yang putus sekolah, dan masih sekitar 40% anak usia sekolah untuk tingkat SMA pada tahun 2012 masih belum bersekolah, padahal pendidikan di Kabupaten Kayong Utara telah digratiskan. Masih ditemukan juga anak-anak

yang malas sekolah yang mengakibatkan pihak sekolah bekerja *extra* untuk menjemput anak-anak yang malas tersebut. Anak-anak yang malas ini disebabkan oleh kurangnya motivasi orangtua untuk mendidik dan menyuruh anaknya sekolah, dan kurangnya partisipasi dari orangtua murid untuk mensukseskan program pendidikan gratis ini sehingga terjadi kesalahpahaman antara orangtua dengan pihak sekolah mengenai pendidikan gratis ini.

#### 4. Implikasi

Secara teoritis, hasil penelitian yang berjudul Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis dan Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara merupakan media yang dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman peneliti dalam ilmu pemerintahan terutama mengenai kebijakan publik. Dengan menjelaskan hasil penelitian ini maka dapat ditentukan indikator evaluasi implementasi kebijakan pendidikan gratis dan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang diatur dalam juknis BOP (Bantuan Operasional Pendidikan).

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Lengbein (dalam Widodo, 1980 :5) yang membagi tipe evaluasi menjadi 2 yaitu, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Peneliti menggunakan teori dari Lengbein yaitu tipe evaluasi proses. Untuk evaluasi proses, penelitian didasarkan pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Adapun yang menjadi indikator penelitian berdasarkan juknis BOP yaitu:

1. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
2. Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Dengan menggunakan teori Lengbein tentang evaluasi proses, peneliti dapat menganalisa apakah evaluasi kebijakan pendidikan gratis sudah sesuai dengan juklak dan juknis dalam hal ini juknis BOP dengan indikator penelitian yaitu dana BOP dan BSM, berdasarkan fakta yang peneliti temukan dilapangan. Untuk selanjutnya, hasil penelitian ini dijadikan media pembandingan bagi peneliti lain yang juga ingin meneliti mengenai kebijakan publik.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi (masukan) perbaikan dalam strategi implementasi kebijakan publik yang di buat oleh pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara, khususnya tentang kebijakan pendidikan gratis dan wajib belajar 12 tahun yang merupakan program unggulan di Kabupaten Kayong Utara.

#### 5. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan yang telah peneliti utarakan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti asumsikan berkenaan dengan indikator evaluasi implementasi kebijakan pendidikan gratis dan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pendidikan gratis, Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara juga perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan seperti laboratorium dan perpustakaan untuk beberapa sekolah yang masih belum mempunyai sarana dan prasarana tersebut, seperti sekolah madrasah yang berbasis agama. Hal ini

penting demi tercapainya keberhasilan pendidikan gratis dan menunjang kegiatan belajar mengajar dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah pesisir dan pedalaman Kecamatan Sukadana agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai makna dari pendidikan gratis dan pentingnya pendidikan bagi anak, sehingga anak-anak yang masuk dalam usia sekolah agar terus bersekolah hingga selesai, alangkah lebih baik jika bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.
3. Perlu adanya sosialisasi dari Dinas pendidikan Kabupaten Kayong Utara kepada orangtua/wali murid, sehingga orangtua/wali murid lebih fokus dalam hal mendidik dan memberikan dukungan kepada anak, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang malas sekolah karena disebabkan oleh kurangnya dukungan dari orangtua/wali murid itu sendiri.
4. Berkenaan dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM), pihak sekolah harus lebih selektif dalam mendata anak yang benar-benar membutuhkan bantuan, karena banyak terjadi kesalahan dalam pendistribusian BSM sehingga BSM masih kurang tepat sasaran. Untuk orangtua/wali murid yang menerima BSM diharapkan bisa mengatur bantuan tersebut untuk keperluan sekolah anak, bukan untuk keperluan pribadi dan lain-lain, sehingga anak bisa terus bersekolah hingga selesai.
5. Berkenaan dengan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Sukadana Kabupaten

Kayong Utara, perlu adanya peraturan baru yang mengatur tentang sanksi bagi anak yang berhenti atau putus sekolah, sehingga pendidikan gratis ini tidak cuma-cuma di dapatkan oleh masyarakat, karena selama ini belum ada peraturan yang mengatur tentang sanksi bagi anak yang berhenti atau putus sekolah.

#### 6. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan-keterbatasan penelitian yang penulis alami adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan peneliti dalam menemukan dan mencari teori yang berhubungan dengan evaluasi implementasi kebijakan publik, dikarenakan kurangnya literatur mengenai evaluasi kebijakan publik.
2. Penulis merupakan peneliti pemula sehingga hasil penelitian kurang maksimal terutama dalam mengolah data dan melakukan wawancara sehingga penulis berharap ada peneliti-peneliti selanjutnya yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan laporan penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Cidesindo.
- Moleong, Lexy. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta; Elex Media Komputindo.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-----, 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Edisi ke Tiga): Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.

#### **Undang-Undang**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).*

*Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*

*Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

*Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.*

*Peraturan Bupati Kayong Utara No. 60.A Tahun 2009 Tentang Layanan Pendidikan Gratis Pada Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Sederajat di Kabupaten Kayong Utara*

